

PERBANDINGAN EKONOMI MAKRO BARAT DAN ISLAM : KAJIAN HISTORIS-NORMATIF¹

Ayif Fathurrahman

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

A. Kajian Historisitas

1. Literatur Ekonomi Barat

Di dalam sejarah ekonomi Barat, perdebatan antara *market* dan *state* menimbulkan pertikaian intelektual yang panjang dan berujung pada intimidasi pemikiran, perampasan hak dan puncaknya memunculkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Adalah kaum Proletar dan bangsawan Borjuis sebagai bentuk konkrit dari sekat sosial yang pernah ada di dalam sejarah sosio-ekonomi Barat.

Sejarah mencatat bahwa Barat telah dilanda zaman kegelapan (*the dark age*) berabad-abad lamanya, kisaran abad ke VIII hingga abad ke XIV. Hal ini terjadi lantaran kekuatan agama terlalu hegemonik mengatur dan mengendalikan kreatifitas masyarakat Barat di segala bidang, termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tumpul dan kreatifitas ekonomi masyarakat nyaris lumpuh.

Pada abad selanjutnya, tidak cukup dengan dogma Gereja saja, masyarakat Barat pun menjalankan aktivitas ekonomi masih dikendalikan oleh kekuatan besar yang bernama "Negara". Sistem ekonomi ini dikenal dengan paham merkantilisme yang memiliki pemahaman bahwa bangsa yang kaya, bangsa yang dapat mengimpun logam mulia (emas dan perak) sebanyak-banyaknya. Sektor perdagangan internasional adalah sektor yang paling diprioritaskan, karena hanya dengan perdagangan internasional lah kumpulan logam mulia bisa didapatkan. Dampak yang dirasakan masyarakat Barat adalah ketidakbebasan di dalam menjalankan aktifitas ekonomi, karena aktifitas "makro" ekonomi hanya milik elit istana. Terjadi inflasi yang begitu tinggi, daya beli masyarakat turun, situasi ekonomi "mikro" masyarakat benar-benar di dalam situasi yang tidak bisa dikatakan layak.

Pada akhir abad ke XIV, terjadinya lah *renaissance*, (Kebangkitan kembali), kebangkitan ini menjadi letupan intelektual dan simbol tegaknya kemerdekaan psikologis dari tekanan, himpitan dan intimidasi kebijakan yang sama sekali tidak berpihak. Adalah Adam Smith dengan bukunya *the wealth of Nation* (1776) menjadi "sang pencerah" di dalam khazanah pemikiran ekonomi Barat. Dengan teori dan falsafah ekonomi ini lah terjadi pergeseran pemahaman tentang epistemologi ekonomi Barat. Pergeseran dari ketidakbebasan atau proteksionisme menuju kebebasan (*freedom*) (kebebasan berdasarkan teori pasar) di dalam bidang ekonomi. Dalam beberapa dekade, terlihat capaian ekonomi "market" ini menunjukkan prestasi kemajuan ekonomi yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi tumbuh menjulang, modal semakin mapan dan besar (akumulasi kapital), teknologi di bidang ekonomi semakin bermunculan sebagai dampak dari tuntutan dan dinamika kemajuan ekonomi. Namun pada saat yang bersamaan, terjadi

¹ Disampaikan pada acara workshop nasional kurikulum ekonomi makro Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), tanggal 13 Maret 2018

ketimpangan dan kesenjangan sosial yang begitu akut. Di saat satu wilayah penuh dengan limpahan modal dan harta, namun di wilayah yang lain masih penuh juga dengan pengangguran dan kemiskinan. Modal menjadi sebuah kekuatan besar, dan bahkan menjadi penentu “satu-satunya” pertumbuhan ekonomi. Paham ini kemudian menjadi terkenal dengan sebutan “kapitalisme”, istilah yang dilontarkan Karl Mark sebagai kritik terhadap dominasi pemilik modal daripada faktor-faktor ekonomi yang lain.

Adanya kesenjangan sosial yang begitu esktrim mendorong Karl Mark untuk melahirkan paham sosialisme. Paham sosialisme adalah paham ekonomi yang bertujuan untuk menghapus sekat-sekat sosial yang disebabkan virus kapitalisme. Paham ekonomi ini meletakkan buruh dan tenaga kerja sebagai faktor yang paling memiliki peran di dalam bidang ekonomi. Dinamika paham ekonomi ini semakin ekstrim ketika paham ekonomi ini menjadikan Negara sebagai pusat dari segala bidang. Hak-hak kepemilikan swasta harus dihapus dan diambil alih oleh Negara.

Perdebatan dua mazhab ekonomi, kapitalisme dan sosialisme masih ada sampai sekarang, bahkan merambah pada kekuatan politik ekonomi global. China adalah negara yang identik dengan sosialisme-komunis, merupakan negara kuat baik dari sisi politik maupun ekonomi. Sedangkan Amerika adalah negara yang identik dengan paham kapitalisme, ber-ideologi kebebasan, juga negara kuat yang sangat berpengaruh di dunia.

Namun di dalam catatan sejarah, ekonomi kapitalisme sempat tenggelam, karena menjadi penyebab ekonomi dunia terguncang pada tahun 1929, dikenal dengan peristiwa *the great depression*. Depresi ekonomi ini hampir-hampir saja menjadikan negara Amerika terpecah menjadi 50 negara bagian, 25% lebih dari angkatan kerja menjadi pengangguran. Inilah sejarah awal peran negara (*state*) mulai diterima di dalam mekanisme pasar (*market mechanism*). Fakta ini menggambarkan ketidakmampuan teori ekonomi klasik/neo-klasik yang bebas dari intervensi negara menghadapi dinamika ekonomi modern yang lebih kompleks. Namun pada akhirnya, bantuan intervensi negara menjadi “jalan keluar” untuk mempercepat keseimbangan ekonomi agar tercapai kembali dengan kebijakan-kebijakan agregatif negara.

Uraian di atas sekelumit kisah “pahit” pemikiran ekonomi Barat yang menggambarkan perdebatan yang “emosional” antara *market* dan *state* dan menyisakan endapan teori “dikotomi” yang seolah-olah antara kekuatan *market* dan *state* harus terpisah.

2. Literatur Ekonomi Islam

Kajian ekonomi Islam kontemporer mulai digelorakan kembali pada tahun 1940-an yang disuarakan oleh sejumlah intelektual muslim, seperti Abul A'ala Mawdudi, Anwar Iqbal Qureshi, dan Mahmud Ahmad. Inilah semangat awal pembentukan “kembali” *body of knowledge* ekonomi Islam kontemporer pada awal-awal abad ke 19 yang saat ini telah dipelajari di berbagai universitas di seluruh dunia. Pemikiran dan praktek keuangan dan ekonomi Islam kontemporer terus berkembang secara gradual dan bertahap selaras dengan pergeseran struktur ekonomi dunia, yang tidak lagi hanya berpusat di dunia Barat, tetapi juga di beberapa Negara mayoritas muslim seperti di kawasan *Gulf Cooperation Council* (GCC) dan Asia Tenggara.

Semangat islamisasi ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu ekonomi berangkat dari gelora “jihad” kemerdekaan baik secara pemikiran maupun teritorial kekuasaan negara-negara muslim (mayoritas populasi muslim) dari kolonialisme dan imperialisme Barat. Dalam catatan sejarah, selama abad 17 hingga paruh pertama abad ke 19 hampir semua Negara Islam dijajah oleh negara-negara Eropa. Imperialisme Negara-negara Barat menjadi satu-satunya pengatur dan pengendali pola aktivitas ekonomi dan sistem keuangan bahkan menjadi pelaku eksploitasi keuntungan dari berbagai kekayaan sumber daya alam Negara-negara Islam untuk kepentingan dan kemakmuran Negara mereka sendiri. Setelah beberapa abad lamanya, baru pada pertengahan abad ke-19, akhirnya muncul kesadaran nasional dan gerakan perubahan serta dorongan untuk kembali mengambil alih tampuk pemerintahan dan menjadi negara yang berdaulat seiring dengan hidupnya spirit internalisasi nilai-nilai, tradisi, dan budaya lokal.

Dalam rangka untuk mengkomodifikasi kepentingan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, maka muncullah gerakan yang berbasis tradisi dan keagamaan, salah satunya adalah gerakan menggairahkan ekonomi keuangan Islam. Pembentukan ekonomi dan keuangan Islam adalah puncak reaksi terhadap penetrasi Barat di dunia Islam. Karena sudah sekian lama negara-negara Barat telah masuk mengatur perekonomian Negara-negara muslim dengan mendirikan bank berbasis sistem Barat dalam rangka mendukung kegiatan komersial mereka. Sebagai contoh, Inggris mendirikan *Imperial Ottoman Bank* (1856) di wilayah dinasti Ottoman dan *Imperial Bank of Persia* (1889) di wilayah dinasti Qajar (Shinsuke, 2012).

Di samping itu, semangat ini muncul dari landasan normatif agama Islam yaitu al-Qur’an dan al-Hadist. Di dalam al-Qur’an, banyak sekali ayat-ayat yang melarang dengan tegas praktek riba dalam aktivitas perekonomian, yang secara substantif, ayat tersebut sangat kontra-produktif dengan praktek perbankan konvensional yang menggunakan *interest-based system*.

Kupasan singkat sejarah ekonomi Islam di atas, menggambarkan spirit normatif dari al-Qur’an untuk melawan penyimpangan pemikiran ekonomi dan semangat untuk mengembalikan ‘ruh’ ekonomi yang bernama keadilan. Dan tidak ada satu kata pun yang menerangkan ada pertikaian pemikiran antara *market* dan *state* seperti yang telah terjadi di sejarah pemikiran ekonomi Barat, karena pada dasarnya fokus kajian ekonomi Islam terletak pada khazanah konsep dan teori “keadilan”.

B. Perlukah istilah “makro” dalam pembelajaran ekonomi islam?

Di dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam, istilah “ekonomi makro” belum pernah ditemukan. Karena kajian ekonomi Islam bersifat komprehensif dan substantif tentang keadilan. Dalam sejarah ekonomi Barat, pada abad XV hingga XVII, istilah ekonomi pun masih berkuat pada kata “*political economy*”. Misalnya buku David Ricardo yang berjudul “*the principle of political economy and taxation*”, pada tahun 1817.

Namun seiring dengan dinamika perkembangan kajian ekonomi, maka istilah “mikro” ataupun “makro” mulai diperkenalkan, “barangkali” dengan pertimbangan untuk memudahkan mempelajari kajian-kajian ekonomi yang sangat dinamis dan luas cakupannya. Ekonomi mikro fokus pada kajian *behaviour* pelaku ekonomi, sedangkan ekonomi makro lebih kepada hal-hal aktivitas ekonomi secara agregat.

Namun secara historis, yang terjadi adalah lahirnya teori ekonomi makro sebagai kritik terhadap teori ekonomi klasik (*market*) dengan memberikan ruang gerak bagi negara (*state*) untuk masuk dalam wilayah aktivitas ekonomi, dalam rangka mengatasi peristiwa *the Great Depression* pada tahun 1929. Teori ini dipelopori oleh John Maynard Keynes, ekonom Inggris melalui bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936).

Dengan demikian, nuansa pertikaian intelektual antara *market theory* dan *state-intervention theory* masih mengakar sebagai “grand theory” di dalam dinamika pemikiran ekonomi Barat. Sehingga tradisi pembelajaran ekonomi selama ini, yang memisahkan wilayah ekonomi mikro (*market*) dan makro (*state*) terkesan “menenggelamkan” sesuatu yang lebih substantif, seperti *values*. Karena hanya berbicara sebuah asumsi, realita, ruang lingkup dan *behaviour* pelaku ekonomi, tanpa ada nuansa edukatif. Nuansa edukatif yang dimaksud adalah proses penyadaran sebuah tatanan nilai keadilan di bidang ekonomi dalam rangka menyangga keseimbangan dan pemerataan (*equality*). Ekonomi bukanlah seperti hutan yang dihuni oleh segerombolan pemangsa dan segerombolan yang dimangsa. Sehingga hukum ekonomi layaknya “hukum rimba”, siapa yang kuat modalnya, maka dialah yang menjadi raja dan penguasa. Maka dengan demikian, teori ekonomi Islam adalah teori tentang keadilan sosial di dalam ekonomi.

Berbeda dengan ekonomi Islam, gambaran sifat keilmuan ekonomi Barat tergambarkan dengan sifat *free value*, bebas nilai. Padahal kajian ekonomi adalah *behaviour*, yang sangat dipengaruhi oleh nilai dan tradisi yang mengelilinginya. Prilaku (*behaviour*) itu tidak konstan, tetapi sangat dinamis dan selalu berubah-ubah sesuai dengan dinamika tatanan sosio-ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, menurut hemat penulis, penamaan istilah “ekonomi mikro islam” perlu waktu khusus untuk diskusi dan kesepakatan lagi, karena prilaku (*behaviour*) adalah wilayah normatif, yang perlu mendapatkan bimbingan (*guidance*). Bukan sekedar asumsi dan hukum, tetapi lebih bersifat normatif-doktrinal. Kentalnya tekanan normatif disini, menurut Islam, karena manusia memiliki 2 kecenderungan yang membutuhkan bimbingan, yaitu berupa kebaikan dan keburukan (Qs. As-Syam:8). Kebaikan bisa mendorong kepada keseimbangan ekonomi, dan sebaliknya keburukan bisa memunculkan kesenjangan sosial. Sehingga fokus kajian ekonomi mikro Islam setidaknya meliputi 3 aspek fundamental, yaitu: 1). Pemantapan aqidah; 2). Pematangan akhlak; 3). Kajian hukum transaksi muamalah (Syariah).

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, pengembangan dari ekonomi mikro Islam di atas, maka ekonomi makro islam adalah *the real islamic economics* itu sendiri sebagai “eksekutor” kebijakan pro kemaslahatan. Tanpa istilah “makro”, kajian-kajian ekonomi islam rata-rata sudah mengarah kepada kemaslahatan sosial yang bersifat agregat. Di samping itu, ekonomi Islam bukan hanya sekedar ilmu yang menjabarkan tentang manusia sebagai *homo economicus*, tetapi juga dipahami sebagai cara untuk mengatasi problematika sosial yang dikaji berdasarkan kajian integratif teori empiris-ilmiah dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur’an.

C. Menuju Kurikulum Ekonomi Makro Islam Solutif

Pada masa Rasulullah, aktivitas ekonomi pasar berjalan dengan prinsip masalah. Konsep masalah diyakini sebagai penyangga keseimbangan (*equalibrium*) ekonomi. Konsep masalah ini bisa berbentuk stabilitas harga, seperti pada kasus “pembiaran” pasar Yahudi di Madinah untuk tetap eksis beroperasi, meskipun telah berdiri juga pasar Islam (*suqul anshor*) dan pada saat itu Rasulullah adalah pemimpin Madinah. Jika dilihat dalam kaca mata ekonomi mikro, bisa saja dikatakan sebagai konsep persaingan sehat tanpa ada intervensi negara. Namun hemat penulis, kebijakan ini lebih mengarah pada konsep keseimbangan penawaran agregat (*agregat supply*) dan permintaan agregat (*agregat demand*). Meskipun praktek pasar Yahudi tergolong “hitam”, namun pasarnya adalah wadah komoditas dan merupakan bagian dari *agregat supply* yang siap men-*supply* komoditas untuk permintaan (*agregat demand*) masyarakat Madinah.

Peroalan ekonomi makro lain adalah fenomena pangangguran dan kemiskinan yang juga menjadi perhatian serius Islam pada masa Rasulullah. Bahkan sejumlah ayat dalam al-Qur’an berbicara tentang strategi penanggulangan persoalan *parennial* ini, seperti QS. al-Maun, 107:1-3 dan QS. Ar-Rum, 30:38, dll, yaitu dengan konsep zakat. Adanya konsep zakat digerakkan oleh pemerintah pusat menunjukkan Islam telah menyediakan kebijakan fiskal yang termasuk dalam wilayah ekonomi makro untuk mengatasi ketimpangan, kesenjangan dan permasalahan-permasalahan ekonomi.

Konsep zakat (fiskal) selaras dengan konsep harta (moneter) dalam Islam, yang senantiasa harus mengalir, “..supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..”(QS. Al Hasyr: 7). Dengan konsep ini, riba itu haram menjadi sangat rasional, karena hanya berputar-putar dikalangan orang kaya saja, bahkan dengan mengeksploitasi pihak yang lain.

Di dalam pandangan Islam, keberhasilan orang kaya adalah atas keterlibatan banyak pihak, termasuk para fakir miskin:

“Kalian mendapat kemenangan dan kecukupan berkat orang-orang lemah di antara kalian.” Demikian Nabi Saw. bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud melalui Abu Ad-Darda’.

Dengan demikian, kewajiban zakat menjadi sangat rasional, karena kekayaan yang diraih adalah kontribusi dari banyak pihak.

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta, (QS. Az-Zariyat, 51:19)

Secara konsep dan teori, ekonomi “makro” Islam layaknya “ekosistem” tersusun secara sistematis dan sangat rapi. Antara konsep, dan teori dengan permasalahannya saling bertautan dan bertalian, dan tetap di dalam bingkai “*grand theory*” berupa teori masalah (*maqasid syariah*). *Wallahu’alam bis shawab.*